

## ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang latar belakang masalah persoalan aborsi akibat pemerkosaan yang merupakan realitas sosial yang akhir-akhir ini semakin menggejala di tengah-tengah masyarakat. Maraknya praktik aborsi menjadikan fenomena tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. Memang aborsi betul-betul menjadi sebuah permasalahan yang sangat sensitif bila sang pelaku tidak mendapatkan informasi yang cukup dan benar. Tidak jarang di Indonesia aborsi dilakukan bukan karena faktor kesehatan atau usia akan tetapi karena faktor malu dan harga diri. Penelitian tesis ini di latar belakang pada Pasal 75 ayat 2 yang melegalkan aborsi akibat perkosaan yang berdasarkan pada Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sementara banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan aturan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, (1) Bagaimanakah pengaturan mengenai perbuatan aborsi akibat pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (2) Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap perbuatan aborsi akibat pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Objek utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data di tempuh dengan pengambilan data sekunder yang diperoleh melalui RUU, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, jurnal, makalah.

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa aborsi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, harus ada alasan serta syarat yang terpenuhi sesuai dengan kualifikasi undang-undang. Sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai dengan hukuman, karena pada dasarnya setiap aturan hukum diadakan pasti diikuti dengan sanksi hukumnya, sehingga peraturan hukum tidak hanya mengatur akan tetapi juga bersifat memaksa bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Dilihat secara yuridis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 khususnya ayat (2) memberikan ruang untuk dilakukannya tindakan aborsi bagi korban perkosaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dilakukan aborsi. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ayat (1) dipertegas bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan, Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian Negara dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

*Kata kunci : Aborsi, Perkosaan, Undang-Undang Tentang Kesehatan, HAM*

## **ABSTRACT**

*This thesis discusses the background of the problem of abortion due to punishment which a social reality that has recently become increasingly prevalent in society. The rise of abortion practices has made this phenomenon commonplace. Indeed, abortion has become a very sensitive issue if the perpetrator does not have sufficient and correct information. It is not uncommon in Indonesia that abortions are performed not because of health or age factors but because of shame and self respect. This thesis research in the background backs in article 75 paragraph 2, which legalized abortion due to rape that is based on the law – Act No. 36 of 2009 concerning health, while many laws and regulation that conflict with these rules.*

*The research objective of this thesis is to determine and analysis, (1) What is the setting of the act of abortion due to rape by Law – Law No. 36 of 2009 on Health (2) How does a review of the law against the act of abortion due to rape by Law – Law No. 36 of 2009 on Health in associate with based Human Rights.*

*This thesis research using normative juridical approach. Legal protection in this study is a secondary data is data that obtained through library research. Data collection techniques in use by secondary data that was obtained bill, the books of scholars, research, journals, papers.*

*The results of this study, indicate that abortion can not be carried out carelessly, there must be reasons and conditions that are met in accordance with statutory qualifications. Sanctions for those who violate these provisions can be subject to punishment, because basically every rule of law is held, followed by legal sanctions, so that legal regulations not only regulate but also compel members of the public who violate these regulations. Viewed juridically, Law No 36 of 2009 on Health, Article 75, paragraph (2), provides room for abortion for victims of rape. The article states that a pregnancy resulting from rape which can cause psychological trauma to the rape victim can be subjected to abortion. In Article 9 of Law No 39 th 1999 on Human Rights paragraph (1) it is emphasized that everyone has the right to live, and to maintain life and to improve his standard of living. Human rights are basic rights that humans have since birth. This right is owned by humans solely because they are human beings not because of a gift from society or a gift from the State and are rights that cannot be ignored.*

*Keywords : Abortion, Rape, Law on Health, Human Rights.*